

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Lembaga Pemerintah merupakan organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara yang menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menetapkan bahwa pemerintah dilaksanakan berdasarkan atas asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. maka dalam rangka desentralisasi dibentuk dan disusun pemerintah provinsi dan pemerintah kota sebagai daerah otonomi.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan program otonomi daerah menurut Bastian (2006 : 338) adalah untuk menciptakan kehidupan politik yang lebih demokratis, menciptakan sistem yang lebih menjamin pemerataan dan keadilan, memungkinkan setiap daerah menggali potensi natural dan cultural yang dimiliki, dan kesiapan menghadapi tantangan globalisasi, serta yang sangat penting adalah terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbandingan antara Kota dan Kabupaten adalah mengetahui seberapa persen Kemandirian keuangan Kabupaten dibandingkan dengan Kota yang notabenehnya sudah baik dari segi Kemandirian Keuangan daerah maupun Pengelolaan Keuangan daerah.

Misi utama Undang-undang nomor 23 tahun 2014 adalah tidak hanya melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah efisiensi dan efektifitas sumber daya keuangan untuk mengelola keuangan daerah masing-masing. Oleh karena itu, kemudian muncul adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Hal tersebut diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dalam laporan keuangan pemerintah tersebut memberi penggambaran kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan negara.

Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi sorotan publik sejak bergulirnya reformasi yang membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk menyuarakan pendapatnya. Mardiasmo (2007: 121) menyatakan bahwa kinerja pemerintah merupakan suatu hal yang menjadi fokus perhatian dalam pengelolaan keuangan Daerah. Kinerja pemerintah yang dimaksud adalah bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memperoleh dan menggunakan dana dalam melakukan pembangunan daerah bersangkutan.

Kemampuan Pemerintah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan, dengan menyumbangkan seluruh potensi yang di miliki oleh masing-masing daerah. Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 Ayat 14 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah dibidang keuangan. Semakin tinggi peranan PAD terhadap APBD maka semakin berhasil usaha pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. PAD menurut Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. sumber pendapatan asli daerah dari Kabupaten Kupang dan Kota Kupang yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Berdasarkan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, APBD dapat di definisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan- kegiatan dan proyek -proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud Mamesa (1995:20) dalam AbdulHalim (2004:15).

Mardiasmo (2009:70), menyatakan APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah meduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapasitas dan efektivitas. Tambunan (2014), menyatakan anggaran pendapatan dan belanja daerah juga merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pendapatan maupun belanja daerah

**Tabel 1.1**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**  
**Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2013-2015 (dalam Rupiah)**

Uraian	Tahun					
	2013		2014		2015	
	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
pendapatan	757.726.868.872	750.107.692.084	876.132.767.836	836.362.953.414	1.094.275.480.463	1.068.039.700.732
Belanja	857.629.778.269	756.888.587.797	960.455.369.721	792.819.508.940	1.253.921.843.081	909.247.570.817
Pembiayaan	99.902.909.397	142.275.182.776	84.322.608.885	130.252.918.143	159.646.362.618	158.675.618.974

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Aset Daerah Provinsi NTT

Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas terlihat bahwa pendapatan daerah pada Kabupaten Kupang meningkat, di mana tahun 2013-2015 realisasinya pendapatannya meningkat. pada bagian belanja daerah, total realisasi belanja daerah Kabupaten Kupang tahun 2013- 2015 meningkat . sementara itu, untuk pembiayaan sendiri berfluktuasi dari tahun 2013-2015

**Tabel 1.2**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah**  
**Kota Kupang Tahun Anggaran 2013-2015 (dalam Rupiah)**

Uraian	Tahun					
	2013		2014		2015	
	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Pendapatan	829.467.178.433	815.933.407.553	2.748.366.237.168	2.787.513.320.677	1.037.957.615.713	1.020.930.686.935
Belanja	691.973.705.849	664.536.384.424	2.903.027.400.928	2.688.932.744.282	1.158.744.432.404	992.065.739.353
Pembiayaan	27.239.643.075	26.767.062.427	154.661.163.760	149.542.638.833	120.816.816.691	120.918.614.491

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Aset Daerah Provinsi NTT

Berdasarkan tabel 1.2 di atas terlihat bahwa pendapatan daerah Kota Kupang meningkat di mana tahun 2013-2015 .pada bagian belanja daerah, total realisasi belanja daerah Kota Kupang tahun 2013-2015 meingkat. sementara itu, untuk pembiayaan sendiri berfluktuasi dari tahun 2013-2015.

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan yang ingin diteliti adalah Bagaimana Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang dan Kota Kupang dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, Rasio Desentralisasi, Rasio Keserasian Belanja. Berdasarkan uraian di atas, peneliti mencoba melakukan **Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan ( studi kasus APBD Kabupaten Kupang Dan Kota Kupang Tahun Anggaran 2013-2015.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten Kupang dan Kota Kupang Tahun Anggaran 2013-2015

## **1.3 Tujuan penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kupang dan Kota Kupang tahun anggaran 2013-2015.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah, sebagai masukan informasi untuk mengelola keuangan Kabupaten Kupang secara lebih efektif dan efisien.
2. Bagi pembaca pada umumnya, sebagai bacaan yang berguna untuk memperluas wawasan tentang keuangan Daerah Kabupaten Kupang khususnya keuangan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.